

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam pembangunan Indonesia, yaitu sebagai dasar pembangunan sektor lainnya. Sejalan dengan itu, sektor pertanian diharapkan dapat tumbuh dengan percepatan yang tinggi sehingga pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat sekaligus memecahkan masalah-masalah ekonomi nasional, yaitu penyediaan pangan, peningkatan bahan baku industri, peningkatan penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat tani.

Tujuan akhir pembangunan pertanian tidak semata untuk peningkatan produksi tetapi juga membangun masyarakat tani seutuhnya. Artinya pembangunan pertanian tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani secara individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian 2

Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis (<http://siteresources.worldbank.org>), diakses 15 April 2009. Kemiskinan telah membatasi hak warga untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) memperoleh perlindungan hukum; (3) memperoleh rasa aman; (4) memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) memperoleh keadilan; (8) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) untuk berinovasi; (10) menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (www.eello.blogspot.com), diakses 5 Mei 2009. Penduduk miskin masih menyebar di setiap pelosok provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Di Pulau Sumatera, Provinsi Lampung merupakan provinsi yang mempunyai penduduk miskin terbanyak kedua setelah Sumatera Utara. Secara rinci jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2004-2007 dapat dilihat pada Tabel 1. 3

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per propinsi dari tahun 2004-2007 (dalam ribu jiwa)

Propinsi	2004	2005	2006	2007
Jumlah	1.157,2	1.166,4	1.149,7	1.083,7
Sumatera Utara	1.800,1	1.840,2	1.897,1	1.768,5
Sumatera Barat	472,4	482,8	578,7	529,2
Riau	744,4	600,4	564,9	574,5
Jambi	325,1	317,8	304,6	281,9
Sumatera Selatan	1.379,3	1.429,0	1.446,9	1.331,8
Bengkulu	345,1	361,2	360,0	370,6
Lampung	1.561,7	1.572,6	1.638,0	1.661,7
Bangka				
Belitung	91,8	95,3	117,4	95,1
DKI Jakarta	277,1	316,2	407,1	405,7
Jawa Barat	4.654,2	5.137,6	5.712,5	5.457,9
Jawa Tengah	6.843,8	6.533,5	7.100,6	6.557,2
DI Yogyakarta	616,2	625,8	648,7	633,5
Jawa Timur	7.312,5	7.139,9	7.678,1	7.155,3
Banten	779,2	830,5	904,3	886,2
Bali	231,9	228,4	243,5	229,1
NTB	1.031,6	1.136,5	1.156,1	1.118,6
NTT	1.152,1	1.171,2	1.273,9	1.163,6
Kalimantan Barat	558,2	629,8	626,7	584,3
Kalimantan Tengah	194,1	230,9	212,8	210,3
Kalimantan Selatan	231,1	235,7	278,5	233,5
Kalimantan Timur	318,2	299,1	335,5	324,8
Sulawesi Utara	192,2	201,4	249,4	250,1
Sulawesi Tengah	486,3	527,5	553,5	557,4
Sulawesi Selatan	1.241,5	1.280,6	1.112,0	1.083,4
Sulawesi Tenggara	418,4	450,5	466,8	465,4
Gorontalo	259,1	255,0	273,8	241,9
Maluku	397,6	411,5	418,6	404,7
Maluku Utara	107,8	118,6	116,8	109,9
Papua	966,8	1.028,2	816,7	793,4
Indonesia	36.146,9	36.654,1	38.643,0	37.168,3

Sumber. Badan Pusat Statistik (BPS) Bandar Lampung, 2007

Tabel 1. menunjukkan bahwa Provinsi Lampung merupakan provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.661.700 jiwa pada tahun 2007. Provinsi Lampung yang terletak di pintu gerbang pulau Sumatera dan dekat dengan pusat kekuasaan seharusnya 4

menjadi sebuah provinsi yang berkembang dan maju di segala bidang, termasuk kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa proses pengentasan kemiskinan masih harus menjadi persoalan mendasar pemerintah daerah yang harus segera dituntaskan. Walaupun banyak program penanggulangan kemiskinan, kenyataannya angka kemiskinan di Lampung makin meningkat. Kurang berhasilnya Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut, yakni pertama Pemerintah Provinsi Lampung tidak memiliki data masyarakat miskin Lampung secara utuh. Data tersebut sangat diperlukan untuk memberikan gambaran masalah dan karakteristik kemiskinan di setiap wilayah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. Kedua, tidak dimilikinya grand desain penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan dan terintegrasi (<http://lzdai.wordpress.com/2008/01/17/kemiskinan-potret-buram-pembangunan-di-lampung>), diakses 15 April 2009. Jumlah dan persentase penduduk miskin per kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2. 5

Tabel 2. Jumlah penduduk miskin per kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2007

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Lampung Barat	390.392	96.700	24,77
Tanggamus	848.895	371.800	26,94
Lampung Selatan	1.380.104	263.000	22,06
Lampung Timur	962.513	185.300	32,16
Lampung Tengah	1.192.203	96.800	25,96
Lampung Utara	1.192.203	103.600	13,03
Way Kanan	576.181	15.500	9,44
Tulang Bawang	372.881		
Bandar Lampung	795.088		
Lampung Metro	134.432		
Lampung	7.487.434	1.661.700	22,19